

## IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR KEMISKINAN PETANI KOTA KUPANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

Maria Ursula Sarila<sup>1\*</sup>, Donwill Panggabean<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Agribisnis, Universitas Terbuka, Kota Tangerang Selatan

<sup>2</sup>Program Studi Magister Manajemen Perikanan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Terbuka,  
Kota Tangerang Selatan

\*Penulis korespondensi: msarila70@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan petani di Kota Kupang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, diskusi, dan observasi di rumah dan di lahan petani, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kantor dinas terkait di Kota Kupang, dan literatur. Analisis data secara deskriptif dilakukan terhadap data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan, untuk mendapatkan gambaran yang jelas faktor penyebab utama kemiskinan petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kemiskinan pada petani di Kota Kupang adalah 1) rendahnya tingkat pendidikan petani; 2) seringnya acara pesta dan adat yang mengurangi aktivitas bertani dan membutuhkan biaya cukup besar mengurus tabungan dan modal. Upaya penting penanggulangan untuk mengurangi tingkat kemiskinan petani di kota Kupang adalah dengan pelatihan inovasi pertanian dan pembentukan Koperasi Usaha Bersama (KUB). Kedua upaya tersebut diharapkan dapat melepaskan petani di Kota Kupang dari lingkaran kemiskinan.

**Kata kunci:** kemiskinan; Kota Kupang; petani

### 1 PENDAHULUAN

“Upaya mengatasi kemiskinan bukanlah sebuah amal, namun satu tindakan mewujudkan keadilan bagi hak asasi manusia yang fundamental”, demikian pernyataan Nelson Mandela, tokoh kemanusiaan dunia yang juga peraih penghargaan Nobel Perdamaian 1993. Lebih lanjut tokoh ini menyatakan bahwa, tidak akan pernah ada kemerdekaan sejati selagi kemiskinan berlanjut (Mandela, 1994) Kemiskinan disebabkan oleh kurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan karena rendahnya pendapatan (Kharisma & Santoso, 2021). Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran (BPS, 2024). Secara konseptual, Ibrahim (2020) menyatakan bahwa kemiskinan dapat diakibatkan oleh empat faktor, yaitu; 1) Faktor individual, hal ini terkait dengan aspek patalogis, termasuk kondisi fisik dan psikologis; 2) Faktor sosial, dimana kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis, yang menyebabkan seseorang menjadi miskin; 3) Faktor kultural, dimana kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep “kemiskinan kultural” yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. Kemiskinan adalah masalah kompleks karena terkait dengan ketidakberdayaan akses secara ekonomi, politik, sosial budaya, dan partisipasi dalam masyarakat (Rahman *et al.*, 2019).

Kemiskinan tidak hanya permasalahan bagi individu yang bersangkutan, namun juga untuk orang banyak pada umumnya (Yulhendri, & Anggraini, 2015). Hasil penelitian Suharto (2015), dan Waskitojati (2020) menjelaskan bahwa faktor-faktor penentu yang kritis dari keparahan kemiskinan adalah efisiensi ekonomi, pendapatan rumah tangga, rasio ketergantungan, total rasio pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi, luas lahan yang diusahakan, akses kredit, struktur produksi rumah tangga, Penelitian Puspitasari dan Triscowati (2022) di Kalimantan Utara menjelaskan bahwa kemiskinan petani disebabkan jumlah anggota rumah tangga, usia, serta pendidikan kepala rumah tangga yang hanya berpendidikan Sekolah Dasar cenderung miskin dibanding dengan kepala rumah tangga yang berpendidikan lebih tinggi. Penelitian (Syarifuddin, 2016) di Kecamatan Payung Kabupaten Karo berbeda, yang menemukan bahwa tidak ada hubungan tingkat pendidikan dengan kemiskinan, penyebab utama kemiskinan di Kabupaten Karo adalah modal, luas lahan dan jumlah tanggungan memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat kemiskinan petani. Penelitian Medah (2013) menjelaskan bahwa kemiskinan petani di Kecamatan Kupang Timur utamanya karena tingkat pendidikan yang rendah yaitu mayoritas hanya sampai tingkat pendidikan Sekolah Dasar, akibatnya penerapan teknologi modern terhambat yang berdampak pada rendahnya pendapatan dan kesejahteraan petani. Petani tidak memiliki peluang untuk akses kredit karena sulitnya proses kredit pada bank sehingga mereka lebih cenderung ke rentenir. Selain itu, aktifitas budaya sosial lainnya seperti seringnya kegiatan pesta adat yang pada akhirnya mengurangi modal usaha tani dan menghambat kualitas kerja mereka di sawah dan kebun yang berdampak pada rendahnya produktivitas hasil pertanian mereka. Kota Kupang yang juga merupakan Ibukota Provinsi NTT termasuk salah satu kota dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, salah satunya akibat persaingan dalam dunia pekerjaan dimana lapangan pekerjaan cukup terbatas. Lahan yang terbatas untuk usaha pertanian di Kota Kupang memainkan peran penting dalam tingginya angka kemiskinan, karena produksi hasil pertanian konvensional dari lahan terbatas tentu saja akan menghasilkan produksi yang terbatas pula (Suwartana & Siagian, 2022).

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bahkan pada Maret 2021 tingkat kemiskinan di provinsi NTT jauh di atas rata-rata nasional yang mencapai 10,14%. Tingginya angka kemiskinan tersebut menempatkan NTT menjadi provinsi termiskin ketiga di Indonesia setelah Provinsi Papua dan Papua Barat. Tingkat kemiskinan di Provinsi NTT cenderung menurun pada periode 2015-2019, namun Covid-19 pada tahun 2020 mengakibatkan kemiskinan di NTT meningkat kembali menjadi 20,90% (1,15 juta orang) pada Maret 2020, dan menjadi 21,21% (1,17 juta orang) pada September 2020. Kemudian, tingkat kemiskinan di Provinsi NTT kembali menurun seiring perekonomian yang perlahan mulai meningkat kembali yaitu menjadi 20,99 persen (1,16 juta orang) pada Maret 2021 (BPS Provinsi NTT, 2021). Sektor pertanian adalah salah satu sektor dengan kontribusi terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT, dengan kontribusi 29,43% pada triwulan I 2021 (BPS, 2021), tapi pertumbuhan ini cukup lambat, yaitu hanya 8% (BPS, 2021). Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja pada sektor pertanian 56,24%, namun umumnya mengelola lahan kurang dari 0,5 hektar (gurem) yaitu 341,51 ribu rumah tangga petani atau 42,21% dari rumah tangga pengguna lahan. Lebih memprihatinkan lagi bahwa 26,32% dari rumah tangga pertanian tersebut miskin (SUTAS, 2018).

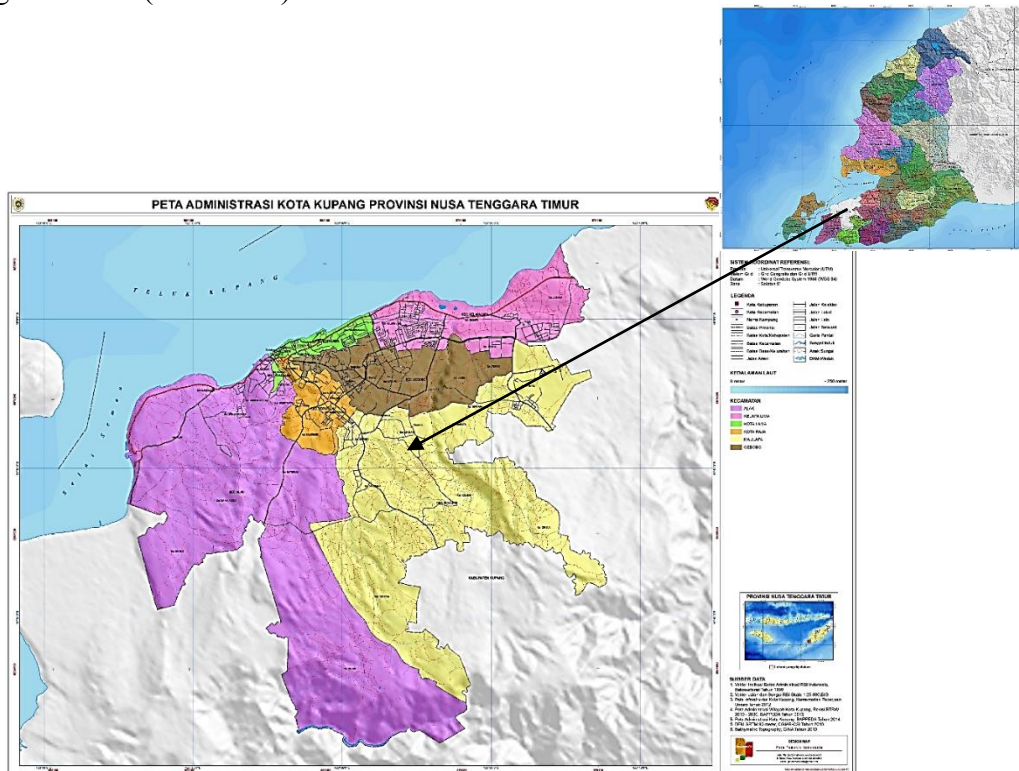
Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian terdahulu terkait kemiskinan petani, tergambar bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan petani di setiap wilayah berbeda-beda, oleh karena itu

perlu dilakukan penelitian terkait faktor penyebab kemiskinan di Kota Kupang. Hal ini juga terkait sektor pertanian yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar dalam PDRB Provinsi NTT. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkini variabel-variabel penting yang berpengaruh pada kemiskinan petani di Kota Kupang.

## 2 METODE

### 2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2024, bertempat di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Gambar 1).



**Gambar 1.** Lokasi Penelitian di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, NTT  
(Wordpress, 2013)

### 2.2 Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penggunaan metode survei lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung di lapangan melalui diskusi dan wawancara kepada responden yaitu petani di Kota Kupang dengan *simple random sampling*. Jumlah total reponden pada penelitian ini sejumlah 28 responden yang seluruhnya adalah petani dengan karakteristik miskin (bermodal kecil dan buruh tani). Observasi lapangan dan pengamatan juga dilakukan langsung terhadap kegiatan rutin petani di lahan mereka. Data sekunder dikumpulkan dan diperoleh dari Kantor Dinas Pertanian Kota Kupang dan literatur dari berbagai sumber.

### 2.3 Analisis dan Pengolahan Data

Analisis data dilakukan terhadap data primer dan data sekunder serta informasi yang telah berhasil dikumpulkan di lapangan melalui observasi dan pengamatan lapangan. Seluruh data dan informasi tersebut selanjutnya ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif, selanjutnya disajikan dalam bentuk info grafis (peta, tabel, grafik, dll).

### 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Kondisi Umum Pertanian Kota Kupang

Kota Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan merupakan kota terbesar di Pulau Timor yang terletak di pesisir Teluk Kupang, bagian barat laut dari Pulau Timor. Kota Kupang memiliki 6 kecamatan dan 51 kelurahan, dan luas wilayah Kota Kupang adalah 152,59 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 455.502 jiwa. Secara geografis Kota Kupang terletak pada 10°36'14"-10°39'58" LS dan 123°32'23"-123°37'01"BT. Pada bagian utara berbatasan dengan Teluk Kupang, pada bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Kupang, pada bagian barat berbatasan dengan Selat Semau dan Kabupaten Kupang, sedangkan pada bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Kupang (BPS Kota Kupang, 2024).

**Tabel 1.** Lahan Pertanian Menurut Jenis Penggunaan di Kota Kupang

Jenis Penggunaan	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Luas (ha)	%	Luas (ha)	%
<b>Lahan Sawah</b>				
Ditanami 2x setahun	46	0,65	44	0,62
Ditanami 1x setahun	339	4,76	367	5,17
Sedang tidak diusahakan	26	0,37	5	0,07
<b>Lahan kering</b>				
Ladang/Huma/Tegal/Kebun	1.147	16,12	1.140	16,06
Perkebunan	99	1,39	98	1,38
Padang rumput (savana)	1.232	17,30	1.232	17,34
Lainnya	4.228	59,41	4.215	59,36
<b>Kota Kupang</b>	<b>7.116</b>	<b>100,00</b>	<b>7.100</b>	<b>100,00</b>

Sumber: (Diolah dari BPS Kota Kupang, 2024)

**Tabel 1** menjelaskan bahwa sebagian besar lahan di Kota Kupang adalah lahan kering, mencapai 94,14% tahun 2023. sedangkan lahan sawah hanya 5,8%. Terjadi pengurangan luas lahan pertanian sebesar 16 hektar pada tahun 2023. Lahan sawah yang dapat ditanami dua kali setahun berkurang sekitar dua hektar, sedangkan yang dapat ditanami sekali setahun bertambah 28 hektar. Terjadi pengurangan lahan 21 hektar dari lahan yang sedang tidak diusahakan.

Lahan kering berupa ladang/huma/tegal/kebun berkurang dari 1.147 hektar tahun 2022 menjadi 1.140 hektar pada tahun 2023. Lahan perkebunan mengalami penurunan sebesar satu hektar pada tahun 2023. Selain itu, lahan kering lainnya berkurang dari 4.228 hektar menjadi 4.215 hektar di tahun 2023. Jenis penggunaan lahan dengan persentase luas terbesar pada tahun 2023 adalah lahan kering lainnya yang mencapai 59,36% diikuti dengan lahan kering padang rumput sebesar 17,34%. Sementara itu, jenis penggunaan lahan dengan persentase luas terkecil adalah lahan sawah yang

sedang tidak diusahakan yaitu sebesar 0,07% diikuti dengan lahan sawah yang dapat ditanami dua kali setahun yaitu 0,62%.

**Tabel 2.** Luas Panen dan Produksi Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kota Kupang (2023)

Kecamatan	Luas Panen (ha)	Produktivitas (kwintal/ha)	Gabah Kering Giling (ton)	Beras (ton)
Alak	44	70	308	193,24
Maulafa	5	70	38,89	24,40
Oebobo	-	-	-	-
Kota Raja	-	-	-	-
Kelapa Lima	-	-	-	-
Kota Lama	-	-	-	-
<b>Kota Kupang</b>	<b>49</b>	<b>73,36</b>	<b>346,89</b>	<b>217,69</b>

Sumber: (Diolah dari BPS Kota Kupang, 2024)

**Tabel 2** menunjukkan komoditas padi ladang hanya ada di Kecamatan Alak dan Maulafa. Total produksi tanaman padi ladang di Kota Kupang sebesar 346,89 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau 217,64 ton setara beras. Kecamatan Alak memiliki luas panen padi ladang terbesar, yaitu seluas 44 hektar atau 89,8% dari total luas panen dengan produktivitas 70 kwintal/ha yang menghasilkan 308 ton GKG atau 193,24 ton setara beras.

**Tabel 3.** Luas Panen dan Produksi Jagung Menurut Kecamatan di Kota Kupang (2023)

Kecamatan	Luas Panen (ha)	Produktivitas (kwintal/ha)	Pipilan Kering Jagung (ton)
Alak	153	70,01	1.072,25
Maulafa	270	65,49	1.768,23
Oebobo	31	63,70	197,47
Kota Raja	11	78,50	86,35
Kelapa Lima	4	46	18,40
Kota Lama	-	-	-
<b>Kota Kupang</b>	<b>469</b>	<b>323,70</b>	<b>3.142,70</b>

Sumber: (Diolah dari BPS Kota Kupang, 2024)

**Tabel 3** menunjukkan produksi jagung pada tahun 2023 sebesar 3.142,70 ton dalam bentuk pipilan kering dengan luas panen sebesar 469 hektar dan produktivitas 64,74 kw/ha. Kondisi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan tersebut salah satunya diakibatkan curah hujan cukup tinggi pada tahun 2023. Produksi jagung terbesar di Kecamatan Maulafa yaitu sebesar 1.768,23 ton dengan luas panen 270 hektar dan produktivitas 65,49 kw/ha.

**Tabel 4.** Luas Panen dan Produksi Padi sawah Menurut Kecamatan di Kota Kupang (2023)

Kecamatan	Luas Panen (ha)	Produktivitas (kwintal/ha)	Gabah Kering Giling (ton)	Beras (ton)
Alak	68	70	476	298,64
Maulafa	30	71,2	2.243,12	1.344,59
Oebobo	11	73,4	89,74	50,66

Kota Raja	47	64,5	303,15	190,20
Kelapa Lima	31	68,45	212,20	133,13
Kota Lama	-	-	-	-
Kota Kupang	458	69,51	3.215,21	2.017,22

Sumber: (Diolah dari BPS Kota Kupang, 2024)

**Tabel 4** menunjukkan produksi GKG di Kota Kupang tahun 2023 sebesar 3.215,21ton dan produksi beras sebesar 2.017,22 ton dengan luas panen 458 hektar dan produktivitas 69,51 kw/ha. Kecamatan Maulafa memiliki luas panen padi sawah terbesar, yaitu 301 hektar dengan produktivitas 71,2 kw/ha. Produksi GKG pada kecamatan maulafa sebesar 2.143,12 ton dengan produksi beras sebesar 1.344,59 ton. Sedangkan Kecamatan Kota Lama tidak memiliki area persawahan karena merupakan daerah pemukiman dan pertokoan.

### 3.2 Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan Petani

#### *Tingkat Pendidikan*

Pendidikan adalah salah satu faktor penting penyebab kemiskinan, karena pendidikan mempengaruhi kemampuan bertani dan mempengaruhi pola pikir. Petani dengan pendidikan rendah sulit menyerap inovasi untuk meningkatkan produksi usahanya, sebaliknya semakin tinggi tingkat pendidikan maka transfer ilmu dan pengetahuan lebih cepat diterima. Tingkat pendidikan rendah sangat sulit mengadopsi pengetahuan dan inovasi, sehingga akan sulit juga terjadi peningkatan produksi, dan hal ini berakibat tetap miskinnya petani tersebut. Tingkat pendidikan responden yang dominan adalah SD, seperti yang disajikan pada **Tabel 5**.

**Tabel 5.** Tingkat Pendidikan Responden

No.	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase (%)
1	SD	19	67,86
2	SLTP	9	32,14
3	SLTA	-	
4	Diploma	-	
5	Sarjana	-	

Sumber: (Data Primer diolah, 2024)

Petani di Kota Kupang memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah, dimana 67,86% petani hanya berpendidikan formal sampai SD. Kondisi ini menggambarkan betapa pendidikan petani masih sangat rendah. Status pendidikan petani secara signifikan berpengaruh terhadap status kemiskinan. Kepala rumah tangga yang berpendidikan SD berpeluang menjadi miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang kepala rumah tangganya berpendidikan SMP ke atas. Hal ini selaras dengan hasil penelitian (Suwartana & Siagian, 2022) yang menyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan sangat signifikan mempengaruhi kemiskinan petani. Hal serupa juga dinyatakan oleh hasil penelitian Medah (2013), Yulhendri & Anggraini (2015), Anggraeni (2020), Yustina (2020), Lutfi et al. (2021), Puspitasari dan Triscowati (2022), yang secara umum menyatakan bahwa pendidikan merupakan faktor penting yang mempengaruhi rumah tangga pertanian dan petani keluar dari kemiskinan.

#### *Budaya Pesta Adat*

Masyarakat kota Kupang sangat menjwai dan taat pada prosesi adat istiadat yang diwariskan leluhurnya, meskipun konsekuensi dari kegiatan adat tersebut adalah pengeluaran biaya (dalam bentuk uang, barang, ternak, dll). Biaya sosial adat relatif membatasi pengelolaan keuangan domestik rumah-tangga. Lebih dari 70% responden menyatakan bahwa adat adalah segalanya bagi kehidupan bermasyarakat. Maka, kebutuhan rumah tangga (pangan, sandang, papan, termasuk pendidikan) dapat dijadikan prioritas kedua manakala saat itu ada kegiatan prosesi adat yang harus diikutinya. Kentalnya kultur budaya dan adat istiadat di Kota Kupang menyebabkan masyarakat pada umumnya lebih khawatir mendapat sanksi adat, atau rasa khawatir mendapat bala atau kutuk adat karena ketidakhadirannya dalam prosesi adat yang wajib diikuti. Biaya sosial adat (belis, pesta adat, membangun rumah adat, dan ritual lainnya), umumnya membutuhkan biaya yang sangat besar dapat menguras tabungan dan biaya domestik rumah tangga (pendidikan anak, nutrisi dan gizi anak, dll) sehingga keluarga terbelenggu “hutang adat”. Bahkan pendapatan keluarga yang meningkat, sebagai upaya program-program pemerintah dan LSM belum mampu mengejar atau memenuhi tuntutan belenggu “hutang adat”. Beberapa pendapat yang bersikap skeptis menyatakan program itu sia-sia, hanya membuang garam ke laut, karena pada akhirnya akan berakhir untuk urusan adat. Hal ini tergambar dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan NTT yang relatif stabil, bahkan cenderung semakin memburuk dari tahun ke tahun termasuk di Kota Kupang. Hal senada dengan hasil penelitian Medah (2013) yang menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan petani di Kabupaten Kupang salah satunya adalah kegiatan pesta adat budaya.

**Tabel 6.** Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Kupang 10 tahun

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	
	Jiwa (dalam ribuan)	Persentase (%)
2015	80,98	23,37
2016	82,57	23,43
2017	84,35	22,91
2018	88,67	23,10
2019	92,02	23,03
2020	94,94	22,77
2021	91,25	22,98
2022	88,02	21,70
2023	90,23	21,78
2024	90,34	21,37

Sumber: Diolah dari BPS Kota Kupang (2024)

### 3.3 Program yang telah dilakukan Pemerintah

#### ***Strategi program Desa Mandiri Anggur Merah (DEMAM)***

Salah satu strategi dari Pemerintah Provinsi NTT untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah dengan diluncurkannya Program Desa Mandiri Anggur Merah (Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera) yaitu program pemerintah pusat yang diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Warga desa diberi kesempatan untuk mendapatkan modal untuk mengubah kesejahteraan mereka. Keberpihakan kepada rakyat adalah fakta di dunia nyata, bukan hanya gagasan retorik. Program ini merupakan program yang mengurus pada keuangan mikro yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi NTT secara menyeluruh sejak tahun 2011, sasaran utama merupakan masyarakat miskin. Program Anggur Merah ini memiliki komponen keuangan mikro dan pendampingan serta peningkatan kapasitas. Program ini fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif, peningkatan infrastruktur desa, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta peran pendamping desa dalam pelaksanaannya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan dengan mengembangkan usaha ekonomi produktif yang memiliki keunggulan kompetitif. DEMAM menyediakan dana hibah kepada desa dan kelurahan untuk mendukung koperasi dan kelompok usaha ekonomi masyarakat (pokmas).

#### ***Proyek Irigasi***

Umumnya penduduk di Kota Kupang hidup dari bercocok tanam, dan peran Dinas Pertanian didasarkan atas petunjuk provinsi, yang mengarahkan proyek pertanian untuk irigasi dan hal-hal yang terkait langsung, seperti membuat bendungan dan saluran air. Hal ini tentu tidak sesuai dengan letak geografis Kota Kupang, sehingga tidak mungkin masuk dalam perencanaan Dinas Pertanian. Dinas Pertanian hanya melakukan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari provinsi. Jika dinas pertanian menyimpang dari juklak dan juknis, maka provinsi akan mencabut dan tidak akan memberikan lagi dana untuk pembangunan pertanian di Kota Kupang. Diharapkan kondisi geografis masyarakat petani di kota Kupang yang tidak mungkin untuk irigasi, dapat menjadi perhatian Dinas Pertanian. Sebaiknya Dinas Pertanian kabupaten diberi kebebasan untuk merancang sendiri proyeknya sesuai dengan kebutuhan dan kebijakannya sendiri, namun



yang terjadi selama ini sepertinya mengabaikan masyarakat yang tinggal di daerah yang tidak cocok untuk irigasi.

#### 4 KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan petani di Kota Kupang utamanya disebabkan: 1) rendahnya tingkat pendidikan; 2) budaya dan pesta adat. Faktor penyebab lainnya adalah: utang piutang (mayoritas responden memiliki utang piutang dan bermodal kecil), pertanian konvensional (mayoritas responden merupakan petani tradisional dan semi tradisional), akses finansial (mayoritas responden tidak mendapatkan akses kredit usaha). Upaya penting penanggulangan untuk mengurangi tingkat kemiskinan petani di Kota Kupang telah dilakukan oleh pemerintah, namun belum dirasakan masyarakat dan kurang efektif. Hasil observasi dan wawancara kepada responden mengindikasikan bahwa dengan pelatihan inovasi pertanian, dan pembentukan Koperasi Usaha Bersama (KUB diharapkan dapat melepaskan petani di Kota Kupang dari lingkaran kemiskinan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada petani di Kota Kupang, Dinas Pertanian Kota Kupang, dan Pemerintah Daerah Kota Kupang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, S. N., Firmansyah, C., Daud, A. R., & Kuswaryan, S. (2020). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Status Kemiskinan Rumah Tangga Peternak Domba di Perdesaan. *Jurnal Sosial Bisnis Peternakan*, 2(2), 51–61.
- Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. (2021). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021*. Berita Resmi Statistik, No. 05/07/5300/Th.XXI, 15 Juli 2021.
- Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. (2021). *Keadaan Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur Februari 2021*. Berita Resmi Statistik, No.08/05/5300/Th. XXIV, 05 Mei 2021
- Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. (2021). *Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan I-2021*. Berita Resmi Statistik, No.07/05/5300/Th. XXII, 5 Mei 2021.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Kupang.
- Bappelitbangda Provinsi NTT. (2018). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023*. Kupang.
- Benjamin. (2019). Latar belakang Sosial Budaya Sumba Barat Daya di NTT. *Kemiskinan di Lahan Subur*, 21(1), 52–76.
- Fujiansyah, D., Aprini, N., & Rainbow, G, A. (2022). Kontribusi Hasil Produksi Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan dan IPM dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan. *Journal Ekombis Review*, 10(1), 129–137.
- Ibrahim, J. T. (2020). *Metode penelitian sosial ekonomi pertanian* (Vol. 1). UMM Press.
- Kharisma, B., & Santoso, T. (2021). Determinan Tingkat Kemiskinan Di Kota Bandung. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(7), 626.
- Lutfi, M. R., Subagiarta, I. W., & Yunitasari, D. (2021). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Buruh Tani Tembakau di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi Ekuilibrium*, 5(1) 2021,28–35.

- Mandela, N. (1994). *Long Walk to Freedom*. Macdonald Purnell (PTY) Ltd, Randburg.
- Medah, M. S. (2013). Analisis Beberapa Faktor Penyebab Kemiskinan Petani Di Kecamatan Kupang Timur–Kabupaten Kupang. *Partner*, 20(2), 144–153.
- Puspitasari, F., & Triscowati, D. W. (2022). Determinan Rumah Tangga Pertanian Miskin di Provinsi Kalimantan Utara. *Ekonomika*, 13, 30.
- Rahman, P. A., Firman, & Rusdinal. (2019). Kemiskinan Dalam Perspektif Ilmu Sosiologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai (Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai)*, 3, 274–282.
- Simatupang, P., & Tarigan, H. (2021). Pengaruh Pemilikan Aset Teknologi Informasi dan Telekomunikasi terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Tani. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 10(1), 1–11.
- Suharto, E. (2015). Peran perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia: Studi kasus program keluarga harapan. *Jurnal Sosiohumaniora*, 17(1), 22–28.
- Suwartana, I. G. M., & Siagian, T. H. (2022). Determinan Status Kemiskinan Rumah Tangga Pertanian. *JSEP*, 19(1), 55–72.
- Syaifuddin. (2016). Kajian Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Kemiskinan Petani (Studi Kasus:Kecamatan Payung Kabupaten Karo). *Jurnal Agrica*, 4(1), 1–8.
- Waskitojati, D., Kameo, D. D., & Wiloso, P. G. (2020). Kemiskinan Di Lahan Subur: Latar Belakang Sosial Budaya dan Tantangan Pertanian di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. *KRITIS*, 29(1), 52–77.
- Wordpress. (2013). Peta Administrasi Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tersedia pada <https://petatematikindo.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/06/administrasi-kota-kupang-a1-1.jpg>.
- Yulhendri, & Anggraini, R. (2015). Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan Masyarakat Petani Di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ekonomi*, 3(1), 1–8.
- Yustina, S. (2020). Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (program NTT, Bengkulu, Indramayu, dan Maluku). *Jurnal Populis*, 8(1), 83–93.